

**ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG USAHA PADA
PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV
CABANG MAKASSAR**



Diajukan Oleh :

**EMANUELA NOVIANTY
4597013043 / 997 111 0410158**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas "45" Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR**

2003



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG
USAHA PADA PT.(PERSERO) PELABUHAN
INDONESIA IV CABANG MAKASSAR

NAMA MAHASISWA : EMANUELA NOVIANTY

NOMOR STAMBUK : 45 97 013 043

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui:

PEMBIMBING I

(Drs. MANSYUR SAIN, DESS, Ak)

PEMBIMBING II

(SUMATRIANI, SE, Ak)

Mengetahui dan Mengesahkan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

(THAMRIN ABDUH, SE, M.Si)

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

(RAJAWATI, SE, Ak)

Tanggal Pengesahan

HALAMAN PENERIMAAN



Pada Hari / Tanggal : Jumat, 16 Januari 2004

Skripsi atas Nama : Emanuela Novianty

No. Stambuk : 45 97 013 043

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : DR. H. Rachmad Baro, SH, MH (.....)

Ketua : Thamrin Abduh, SE, MSi (.....)

Sekretaris : Indriati, SE, Ak (.....)

Anggota Penguji : 1. Drs. Mansyur Sain, DEES, Ak (.....)

2. Rajawati, SE, Ak (.....)

3. Sumatriani, SE, Ak (.....)

4. Thanwain, SE (.....)

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:



1. Bapak Drs. Mansur Sain, DESS, Ak sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Sumatriani, SE, Ak sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur bagi penulis.
2. Segenap pimpinan dan staf PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV cabang Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV cabang Makassar.
3. Ayahanda Lucas La Poasa dan Ibunda Irene Wa Dau serta adik-adik tercinta yang telah mendukung lewat doa dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Paman Kunradus Kampo dan Tante Veronika Hima yang telah memberikan motivasi, arahan dan dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman di Universitas “45” Makassar yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan semua pihak selama penulisan ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Januari 2004

BOSOWA

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Kerangka Teori	5
2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur	5
2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern	8
2.1.3 Klasifikasi Piutang	12
2.1.4 Pengertian Piutang Dagang/Usaha	12
2.1.5 Pengertian Intern Piutang Dagang	14
2.1.6 Rasio Keuangan	18
2.2. Kerangka Pikir	22
2.3. Hipotesis	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Daerah Penelitian	25
3.2. Metode Pengumpulan Data	25
3.3. Jenis dan Sumber Data	26
3.3.1. Jenis Data	26

3.3.2. Sumber Data	26
3.4. Metode Analisis	26
3.5. Defenisi Operasinal	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	30
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	30
4.1.2 Struktur Organisasi dan Job Description	31
4.2. Deskripsi Data	40
4.2.1 Sistem Pengendalian Piutang Dagang pada PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar	40
4.2.2 Sistem Penagihan piutang Usaha	42
4.3. Analisis Data	42
4.3.1 Analisis Unsur Piutang Usaha	42
4.3.2 Sistem Akuntansi Piutang Dagang	53
4.3.3 Analisis Prosedur Pelayanan Jasa	54
4.3.4 Analisis Piutang Usaha	56
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Piutang Tertunggak	2
Tabel 2 Analisa Umur Piutang Usaha 2001	43
Tabel 3 Analisa Umur Piutang Usaha 2002	44
Tabel 4 Saldo Piutang Usaha dan Penjualan Kredit	57
Tabel 5 Rasio Penagihan Piutang	59
Tabel 6 Tingkat Perputaran Piutang	61
Tabel 7 Umur Rata-Rata Pengumpulan Piutang	62
Tabel 8 Umur Rata-Rata Pengumpulan Piutang	64
Tabel 9 Hasil Perhitungan RPP, RTO, ACP dan RTP	65

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 2 Struktur Organisasi	34



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai sarana dalam proses penciptaan dan pelayanan akan barang dan jasa dalam lingkungan usahanya senantiasa berusaha untuk mendapatkan laba (*profit*), di dalam menjalankan usahanya yang berfungsi sebagai roda perusahaan agar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan sebagai suatu kegiatan ekonomi dapat bertahan dalam menjalankan usahanya apabila tidak mengalami kerugian secara terus menerus. Dan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka diperlukan kebijaksanaan manajemen dan terlebih lagi adanya kerjasama antar karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam aktivitas penjualan barang dan jasa pihak manajemen menerapkan proses penjualan secara kas dan kredit. Penjualan secara kredit bagi pihak manajemen merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan agar dalam aktivitas penjualan tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang.

Oleh sebab itu pimpinan perusahaan sebagai pemegang kendali harus mengupayakan bagaimana memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang. Dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka pihak pimpinan perusahaan atau pihak manajemen perlu menetapkan kebijaksanaan dan prosedur yang dapat

digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit kepada nasabah atau langganan serta penetapan waktu pembayarannya.

Sebagai salah satu perusahaan jasa PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar merupakan lembaga keuangan bukan Bank yang menyediakan dan mengusahakan jasa pelabuhan untuk kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan laporan dari hasil penjualan produk jasa, berikut ini penulis menyajikan piutang yang tertunggak pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar selama dua tahun terakhir 2001 – 2002 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Piutang Tertunggak
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar
Tahun 2001 – 2002

No	Keterangan	2001	2002
1	ABRI	151.805.408	168.849.977
2	Instansi Pemerintah	17.146.652	26.443.015
3	BUMN	1.252.269.636	1.279.812.568
4	Swasta	6.011.516.152	4.304.422.318
5	Perorangan	158.340.476	163.481.414
6	ABRI, Swasta (PTR)	215.274.100	254.631.433
7	Perorangan (PTR)	1.263.962	344.321
	Jumlah	7.807.616.386	6.197.985.046

Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar

Berdasarkan data di atas, nampak sejumlah piutang yang tertunggak. Piutang tertunggak bisa timbul karena lemahnya pengendalian di perusahaan, di mana disebabkan karena adanya bagian-bagian pemberi kredit yang merangkap tugasnya, di mana bagian tersebut berfungsi sebagai penaksir akan suatu barang dan bagian itu pula merangkap sebagai pengambil keputusan.

Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit, dan untuk mengetahui langganan mana piutang itu banyak menunggak dan berapa umur piutang tersebut dapat tertagih maka pihak perusahaan memberikan tenggang waktu pembayaran, dan jika langganan terlambat melunasinya maka pihak perusahaan mengambil langkah yakni memberikan sanksi denda kepada langganan. Oleh karena itu penulis memilih judul : “Analisis Pengendalian Piutang pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah seluruh bagian yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit telah berfungsi secara optimal.
2. Apakah dalam pengendalian piutang telah dilakukan secara efektif guna menunjang penerimaan piutang.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengendalian intern atas piutang yang ditetapkan perusahaan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
2. Untuk menilai apakah terdapat kelemahan dari pengendalian intern yang diterapkan perusahaan.
3. Untuk memberikan saran dan penyempurnaan bagi peningkatan pengendalian intern dari piutang perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan prinsip pengendalian intern yang baik atas piutang.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan pengendalian intern perusahaan dan membandingkan dengan teori pengendalian intern.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Istilah sistem dan prosedur mempunyai kaitan yang sangat erat, bahkan keduanya merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Di dalam suatu perusahaan sistem dan prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan adanya sistem dan prosedur yang dirancang dengan baik, maka beberapa manfaat dapat diperoleh sekaligus. Pimpinan perusahaan dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk pengendalian intern perusahaan. Misalnya untuk mengetahui, apakah masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik atau tidak, untuk selanjutnya memudahkan manajemen mengetahui, mengawasi dan mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian ini disebut sub intern ada pula yang menyebutnya sebagai prosedur. Agar sistem dapat berfungsi secara efisien dan efektif, subsistem-subsistem atau prosedur-prosedur itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi ini bisa tercapai terutama melalui komunikasi informasi yang relevan antara subsistem-subsistem.

Dalam bukunya, Zaki Baridwan (1998 : 3) mendefinisikan sistem dan prosedur sebagai berikut:

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menangani secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Setelah kita memahami pengertian sistem secara umum, marilah kita menyortir arti sistem akuntansi dalam bukunya Zaki Baridwan (1998 : 4) mendefinisikan sebagai berikut :

“Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.”

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan sebaiknya dilakukan atas dasar karakteristik dan kebutuhan perusahaan sehingga diharapkan akan dapat mencakup seluruh operasi perusahaan. Zaki Baridwan (1998 : 7) mengemukakan bahwa penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi

yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai.

- b. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern.
- c. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Pada saat perusahaan menjual barang dagangannya, maka diperoleh pendapatan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai dan secara kredit dan pada umumnya kepada beberapa pelanggan. Pada saat menjual kadang-kadang perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga, hal ini dilakukan jika barang yang dijual tidak sesuai dengan permintaan pembeli.

Menurut Mulyadi (1993:252) "sistem penjualan kredit adalah sistem penjualan yang memungkinkan adanya penambahan volume penjualan dengan memberi kesempatan kepada para pembeli membelanjakan penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang."

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa dengan sistem penjualan kredit perusahaan dapat meraih keuntungan yang besar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat menambah volume penjualannya.

Fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan secara kredit adalah:

1. Fungsi kredit
2. Fungsi penjualan
3. Fungsi gudang
4. Fungsi pengiriman
5. Fungsi akuntansi
6. Fungsi penagihan

2.1.2. Pengertian Pengendalian Intern

Sebelum membahas tentang pengertian pengendalian intern maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dari pengendalian. Sebagian penulis mengartikan istilah pengendalian sebagai pengawasan atau kontrol. Namun demikian perbedaan tersebut tidak akan merubah maksud dan tujuannya.

Secara umum pengendalian dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atau unit dalam suatu lingkungan.

R.A. Supriyono (1992:6) dalam buku akuntansi manajemen mengemukakan : "Pengendalian adalah proses manajemen yang bertujuan

untuk menjamin bahwa setiap bagian organisasi berfungsi dengan efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna).”

Hadibroto (1989:18) mengidentikkan pengendalian sebagai usaha yang didefinisikan sebagai berikut : “Pengawasan atau kontrol adalah segala sesuatu yang termasuk dalam aktivitas penentuan apakah terdapat harta benda telah diadakan usaha dalam rangka pengamanan yang sebaik-baiknya.”

Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu pengendalian adalah memperlancar suatu proses agar dapat berjalan dengan lancar, tepat dan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian kekayaan perusahaan dapat memperoleh pengamanan yang sebaik-baiknya. Jika terjadi penyimpangan maka diadakan tindakan koreksi dalam rangka perbaikan, jadi kegiatan pengendalian umumnya bersifat preventif yang disertai dengan tindakan koreksi.

Pengendalian intern diterjemahkan dengan internal control. Secara umum internal control dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian intern yang lebih tepat jika dikaitkan dengan manajemen yang mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan.

Heckert Wilson (1996 : 14) mengemukakan pengertian internal control sebagai berikut : “Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu sistem dan metode yang diterapkan dalam perusahaan yang menghendaki agar pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan tidak menyimpang dari standar atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

M. Samsul (1992 : 70) memberikan pengertian pengendalian intern sebagai berikut : “Pengendalian intern adalah cara-cara untuk mengawasi pengamanan harta kekayaan, memperoleh informasi bagi pimpinan, melancarkan operasional dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan perusahaan.”

Dengan demikian yang terpenting untuk menegakkan disiplin operasi sebagai pencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan, adalah menciptakan pengendalian intern yang efektif.

Sedangkan menurut Hartanto (1990 : 51), internal kontrol merupakan pengawasan intern yang dibaginya dalam dua pengertian yaitu :

“Dalam arti sempit, istilah tersebut disamakan internal check yaitu suatu teknik akuntansi untuk membuktikan kecermatan data akuntansi melalui perbandingan antara hasil kerja dua orang atau lebih mengenai suatu transaksi yang sama namun tidak saling mempengaruhi karena mereka bekerja secara bebas (independen) dari lainnya.

Dalam arti luas, istilah tersebut disamakan dengan *management control*, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.”

Heckert (1996 : 122) mendefinisikan pengendalian intern (*internal control*) sebagai berikut:

“Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan harta, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya,



memajukan efisiensi operasi, dan memastikan pentaatan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen.”

Defenisi tersebut mungkin lebih luas daripada pengertian yang kadang-kadang diberikan untuk istilah ini. Defenisi ini mengaku bahwa satu sistem pengendalian intern bukan saja terbatas pada hal-hal yang langsung berhubungan dengan fungsi-fungsi dari departemen akuntansi dan keuangan.

Heckert (1996 : 123) membagi pengendalian interen sebagai berikut :

- a. Pengendalian akuntansi (*accounting control*) mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama menyangkut pengamanan harta perusahaan serta keterandalan (*reliability*) dari catatan-catatan keuangan.
- b. Pengendalian administratif (*administrative control*) terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya hanya berhubungan secara tidak langsung dengan catatan - catatan finansial.

Jadi ringkasnya, apakah pengendalian digambarkan sebagai pengendalian akuntansi intern (*internal accounting control*) atau pengendalian administratif (*internal administrative control*) sebagian besar tidaklah relevan.

2.1.3. Klasifikasi Piutang

Dalam artian luas, istilah piutang dapat digunakan bagi klaim suatu pihak terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Namun untuk tujuan akuntansi, istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas.

Pengklasifikasian piutang dimaksudkan agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat dilihat secara jelas golongan piutang yang bersumber dari kegiatan operasi perusahaan dan untuk mempermudah para pemakai atau pembaca laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa piutang terjadi selain karena penjualan secara kredit barang dan jasa, juga antara lain dengan memberikan pinjaman karena itulah piutang menurut Zaki Baridwan (1992 : 124) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Piutang dagang (usaha)
- b. Piutang bukan dagang
- c. Piutang penghasilan”

2.1.4. Pengertian Piutang Dagang/Usaha

Penjualan barang-barang dan jasa-jasa dari perusahaan pada saat ini banyak dilakukan dengan cara kredit sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang dan jasa sampai pada saat diterimanya uang. Dalam

tenggang waktu tersebut penjual mempunyai tagihan kepada pembeli, dengan pengakuan akuntansi karena dasar waktu (*accrual basis*). Istilah tagihan ini dimaksudkan dengan klaim perusahaan atas uang, barang dan jasa terhadap pihak lain. Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya digunakan untuk menunjuk klaim yang akan dilunasi dengan uang. Tagihan yang didukung dengan janji tertulis disebut piutang wesel, sedangkan yang tidak didukung dengan janji tertulis disebut piutang.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian piutang:

M. Samsul (1992 : 350), mendefinisikan piutang dagang sebagai berikut : “Piutang dagang adalah merupakan hak tagihan yang timbul dari transaksi operasional penjualan barang-barang atau jasa-jasa.”

Sedangkan menurut Mulyadi (1992 : 464) :

“Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus perusahaan. Piutang umumnya disajikan dalam neraca dalam dua kelompok: piutang dagang dan piutang non dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan.”

Syahrul dan Muh. Afdi (2000) memberikan penjelasan tentang penggolongan *receivables* (piutang) :

“*Receivables* dikelompokkan sebagai perdagangan atau non perdagangan dalam neraca. Tagihan dagang berasal dari pelanggan untuk barang – barang yang dijual atau jasa – jasa yang diberikan dalam bisnis sederhana. Tagihan non perdagangan muncul karena bentuk transaksi dan dituliskan janji untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan jasa. Misalnya tagihan terhadap badan usaha lain, deposito dan tagihan keuangan (piutang bunga, piutang deviden)”.

Dari ketiga pendapat di atas, terdapat pokok penekanan yang sama tentang piutang dagang yaitu bahwa piutang dagang adalah uang yang terhutang oleh pelanggan atas barang yang telah kita jual atau jasa yang telah kita berikan kepadanya.

2.1.5. Pengendalian Intern Piutang Dagang

Piutang merupakan unsur yang penting dalam neraca sebagian besar perusahaan. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang ini adalah penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dari para pelanggan.

Tentunya fungsi perencanaan akan turut mempertimbangkan jumlah yang akan tertanam dalam piutang, dan mengukur jumlah tersebut dengan membandingkannya terhadap modal yang tersedia serta hubungannya dengan penjualan, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini:

Pengendalian intern piutang dengan menurut J.B. Heckert, James, Jhon (1996 : 418) adalah sebagai berikut : “Pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan untuk mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur sampai berakhir dengan penagihan hasil penjualan.”

Prosedur pengendalian piutang tersebut erat hubungannya dengan pengendalian kas di satu pihak dan pengendalian persediaan di lain pihak, piutang merupakan mata rantai diantara keduanya.

Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif maka ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. Menurut J.B. Heckert, James, Jhon (1996 : 418) ketiga bidang tersebut adalah:

- “1. Pemberian kredit dagang. Kebijakan kredit dan syarat harus tidak menghalangi penjualan kepada pelanggan yang keadaan keuangannya sehat, dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan.
2. Penagihan (*collection*). Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat pembayaran dalam waktu yang wajar.
3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Meskipun prosedur permintaan kredit dan penagihan telah diadministrasikan dengan baik ini tidak menjamin adanya pengendalian piutang.”

Sedangkan Kosasih (1985: 403) memberikan petunjuk bahwa:

“Pengendalian intern atas piutang dimulai dari penerimaan order penjualan, kemudian ke persetujuan order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang yang akan mempengaruhi saldo kas/bank, dengan memperhatikan retur penjualan.”

Menurut Kosasih (1985 : 404), pengendalian intern atas piutang dapat dinilai telah memenuhi syarat apabila terdapat hal-hal berikut ini :

- “1. Fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pembukuan.
2. Pembukuan penjualan harus dipisahkan dari penerimaan kas sebagai hasil penagihan piutang.

3. Retur, potongan harga dan penghapusan piutang ragu-ragu harus disetujui dengan pihak yang berwenang.
4. Pejabat yang berwenang memutuskan penjualan kredit harus terpisah dengan bagian penjualan.
5. Rekening koran harus dikirim kepada debitur setiap akhir bulan oleh petugas yang bukan pemegang buku piutang dan buku petugas pembuatan faktur.
6. Petugas yang menyelenggarakan buku tambahan piutang, tidak boleh turut campur dalam penerimaan kas. Pembukuan pada kartu piutang harus langsung dari buktinya.
7. Semua kartu piutang harus diversifikasi secara periodik oleh petugas independen, sebaiknya oleh pemeriksa intern. Saldo piutang harus dikonfirmasi langsung kepada debitur.
8. Perusahaan harus dapat membuat daftar analisa umur piutang secara periodik.
9. Faktur penjualan, order penjualan dan nota kredit harus bernomor tercetak dan pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan."

Untuk meyakinkan bahwa telah diterapkan prosedur yang layak dan wajar untuk mengurangi risiko menjadi sekecil mungkin maka J.B. Heckert, James dan Jhon (1996 : 426) mengemukakan persyaratan pengendalian intern sebagai berikut:

1. Faktur kepada pelanggan dibandingkan dengan memo pengiriman oleh seorang pegawai yang independen.
2. Semua barang yang dikeluarkan dari perusahaan harus mempunyai memo penyerahan/pengiriman (memo terlebih dahulu diberi nomor).
3. Harga pada faktur dicek secara independen terhadap daftar harga, begitu pula harus dicek semua perkalian dan penjumlahan dalam faktur.
4. Secara periodik perincian piutang dicek terhadap perkiraan buku besar dan direkonsiliasikan oleh petugas yang independen.
5. Pengiriman laporan bulanan dan permintaan konfirmasi kepada pelanggan harus dilaksanakan secara mendadak oleh pihak ketiga yang independen.
6. Semua tugas pengurusan kas harus dipisahkan dari tugas penyelenggaraan catatan/pembukuan piutang.
7. Semua penyesuaian khusus untuk diskon, retur atau potongan-potongan lain harus mempunyai persetujuan khusus.

8. Harus diselenggarakan suatu catatan khusus mengenai semua piutang sanksi/ragu-ragu yang dihapuskan, dan harus dilakukan suatu tindak lanjut yang tetap atas piutang seperti ini untuk dapat memperkecil bahaya adanya penerimaan tetapi tidak dibukukan.
9. Secara sampling, lembaran penerimaan dapat dibandingkan dengan perkiraan piutang dan laporan pengiriman/ penyerahan.
10. Faktur dapat dikirimkan kepada para pelanggan melalui unit tersendiri."

Praktek - praktek diatas berguna dalam mencegah keadaan sulit, misalnya pada saat penyerahan barang yang tidak dibebankan semestinya pada perkiraan debitor. Selain itu meskipun telah disiapkan suatu faktur, tetapi bisa saja difaktur pelanggan jumlahnya tidak benar karena perbedaan kuantitas penyerahan, harga dan hasil perkalian. Kejadian ini dapat terjadi karena kesalahan pembukuan atau karena kecurangan.

Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh beberapa penulis di atas maka diperlukan administrasi piutang yang menurut M. Samsul (1992 : 350) bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi untuk penagihan tepat waktu.
2. Meyakinkan jumlah piutang itu memang ada, dan bukan fiktif.
3. Menentukan tingkat kecairan, untuk pengelompokan ke aktiva atau ke aktiva lain-lain.
4. Untuk mendapatkan dasar dalam membuat cadangan dan penghapusan piutang.
5. Untuk mengontrol apakah maksimum kredit masing-masing langganan terlampaui atau tidak.
6. Sebagai sumber penilaian kondisi si debitor.
7. Sebagai kontrol terhadap saldo buku besar piutang."

Secara garis besar administrasi piutang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai piutang; apakah pelaksanaannya menyimpang dari rencana atau tidak.

2.1.6 Rasio Keuangan

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang gambaran keuangan suatu perusahaan, perlu diadakan interpretasi atau analisa terhadap suatu data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Adapun pengertian rasio menurut Syahrul dan Muh. Afdi (2000 : 693) adalah :

“Hubungan antara suatu jumlah terhadap jumlah yang lain. Rasio bisa membandingkan pos-pos dalam neraca, pos-pos dalam laporan laba rugi atau pos-pos dalam neraca dengan pos-pos dalam laporan laba rugi. Akibatnya, rasio-rasio tersebut menghubungkan komponen laporan keuangan satu dengan yang lain. Rasio-rasio digunakan untuk mengevaluasi keuangan perusahaan, hasil operasi, dan prospek pertumbuhan. Misalnya perputaran piutang (*accounts receivable turnover*) akan menunjukkan persoalan penagihan dengan langganan”.

Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan diperoleh gambaran yang jelas tentang baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan. Analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal yang sangatlah umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan.

Pengelompokkan rasio keuangan menurut Syahrul dan Muh. Afdi (2000 : 371) : dikolompokkan ke dalam empat tipe dasar, yaitu :

1. Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.

2. Rasio Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya.
3. Rasio Leverage, yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan utang.
4. Rasio profitability, yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Pada pembahasan ini penulis hanya menganalisis rasio aktivitas khusus menyangkut piutang, yaitu rasio penagihan piutang, tingkat perputaran piutang (*receivable turnover*), umur rata-rata pengumpulan piutang (*average collection period*) dan rasio tunggakan.

1. Rasio Penagihan Piutang

Rasio penagihan piutang menunjukkan hubungan antara jumlah piutang yang tertagih selama satu periode dengan total piutang pada awal periode. Besarnya rasio penagihan piutang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan piutangnya yang dinyatakan dalam prosentase.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Piutang Tertagih}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Perputaran Piutang

Perhitungan tingkat perputaran piutang tujuannya untuk mengetahui kecepatan penagihan/pengumpulan piutang. Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata-Rata}} = \dots \text{ kali}$$

3. Umur Rata-Rata Pengumpulan Piutang (Average Collection Period)

Periode terikatnya modal dalam piutang atau umur rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turnovernya. Tujuannya untuk mengetahui kecepatan penagihan/pengumpulan piutang yang dinyatakan dengan hari.

Rumus :

$$\frac{360}{\text{Tingkat Perputaran Piutang}} = \dots \text{ hari}$$

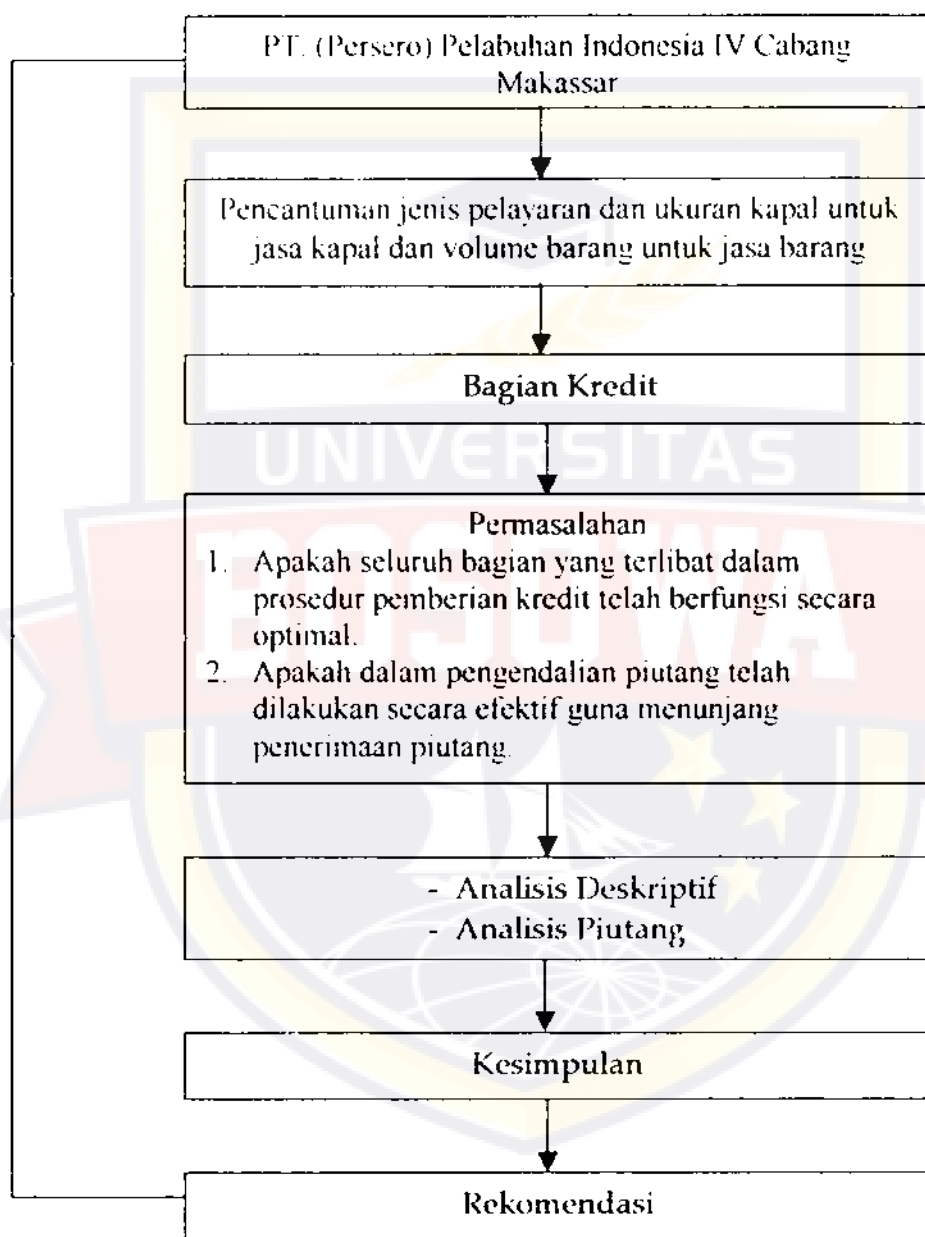
4. Rasio Tunggakan

Rasio tunggakan digunakan untuk mengetahui berapa besar jumlah piutang yang telah jatuh tempo dari sejumlah piutang kredit yang dilakukan dari piutang tersebut yang belum tertagih.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah piutang tertunggak akhir periode}}{\text{Total piutang pada periode yang sama}} \times 100 \%$$

Dengan menggunakan perhitungan rasio tunggakan di atas, maka dapat diketahui dampak dari kebijaksanaan yang ditempuh oleh perusahaan dalam mengendalikan piutangnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan jumlah piutang tertunggak dan meminimalkan penjualan kredit sebagai upaya untuk mencegah resiko piutang tak tertagih atau *bad debt expenses*.

2.2. Kerangka Pikir



Gambar 1 : Kerangka pikir

Bagian penting dalam proses pengendalian terhadap piutang, pihak perusahaan mengambil beberapa langkah dalam proses pemberian kredit tersebut. Di mana setiap pelanggan harus mencantumkan jenis pelayaran dan ukuran kapal Untuk jasa kapal dan volume barang untuk jasa barang. Tujuannya untuk menentukan nilai jasa dari pemakaian fasilitas pihak perusahaan.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar menghadapi masalah pada pengendalian piutangnya, yaitu:

1. Apakah seluruh bagian yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit telah difungsikan secara optimal.
2. Apakah pengendalian piutang telah dilakukan secara efektif guna menunjang penerimaan piutang.

Dari permasalahan di atas dapat diselesaikan apabila seluruh bagian-bagian terlibat dalam proses pemberian kredit difungsikan secara baik dan optimal dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan teori akuntansi yang berlaku. Setelah itu akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan proses pemberian kredit pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang digunakan adalah:

1. Diduga bahwa bagian yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit belum berfungsi secara optimal.
2. Diduga bahwa terjadi penyimpangan atas prosedur pemberian kredit dan penerimaannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar yang berlokasi di Kotamadya Makassar.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pemberian kredit dan pengelolaan data keuangan pada bagian pembukuan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar.

b. Interview (wawancara)

Teknik interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pimpinan perusahaan, kepala bagian pembukuan dan sejumlah personil yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data keuangan perusahaan (data piutang).
- b. Data kualitatif, yaitu berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi serta sistem dan prosedur pemberian kredit.

3.3.2. Sumber data

Sumber data diperoleh dari :

- a. Data primer
Yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan kepala bagian keuangan dan beberapa karyawan yang berwenang.
- b. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang dibuat secara berkala.

3.4. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif atau sistem pengendalian intern atas penerimaan piutang yaitu suatu analisis untuk mengetahui apakah sistem pengendalian piutang telah mencerminkan elemen-elemen *internal control* yang sehat.
2. Analisis piutang dengan alat analisis :

- a. Analisis persentase penagihan

Menunjukkan hubungan antara jumlah piutang yang tertagih selama satu periode dengan total piutang pada awal periode yang dinyatakan dalam prosentase.

Rumus:
$$\frac{\text{Jumlah yang tertagih}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

- b. Tingkat perputaran piutang

Menghitung berapa lama yang dibutuhkan dalam rangka penagihan piutang.

Rumus:
$$\text{Receivable turn over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Rata-rata piutang}} = \dots \text{ kali}$$

- c. Umur rata-rata piutang

Menghitung kecepatan penagihan atau pengumpulan piutang yang dinyatakan dalam jumlah hari. Umur rata – rata piutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :



Rumus :
$$\frac{360}{\text{Receivable turn over}} \dots \text{hari}$$

d. Ratio tunggakan

Menghitung berapa besar jumlah piutang yang tertunggak dibandingkan dengan penjualan kredit:

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Piutang Tertunggak akhir periode}}{\text{Total Piutang Pada Periode Yang Sama}} \times 100\%$$

3.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian sistem dan prosedur

Yaitu suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk menjalankan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan pembagian pekerjaan yang biasanya melibatkan

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menangani secara seragam transaksi perusahaan yang sering terjadi.

b. Pengertian sistem penjualan kredit

Yaitu sistem penjualan yang memungkinkan adanya penambahan volume penjualan dengan memberi kesempatan kepada para pembeli membelanjakan penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang.

c. Pengertian pengendalian

Yaitu proses manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap bagian organisasi berfungsi dengan efisien (berdaya guna) dan efektif berhasil guna.

d. Pengendalian intern

Yaitu cara-cara untuk mengawasi pengamanan harta kekayaan, memperoleh informasi bagi pimpinan melancarkan operasional dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan perusahaan.

e. Pengertian piutang dagang/piutang jasa

Yaitu hak tagihan yang timbul dari transaksi operasional penjualan barang-barang atau jasa-jasa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pengolahan pelabuhan mulai diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya perkembangan dalam sistem Pemerintahan di Indonesia Timur, secara analogis dapat diperkirakan bahwa Pelabuhan ini tidak mungkin dapat bertahan sebagai pelabuhan transito cepat atau lambat sebagian atau seluruhnya pelabuhan ini akan mengalami peralihan kepada pola industri. Hal ini dimungkinkan oleh letaknya yang strategis dalam perdagangan antar pulau maupun internasional. Untuk itu diperlukan suatu master plan pelabuhan yang mampu menjangkau kemungkinan-kemungkinan untuk masa yang panjang (*low run*) khususnya dalam penentuan lokasi industri yang bersangkutan paut dengan masalah transport.

Pelabuhan Makassar yang terletak di wilayah administrasi Kotamadya Ujung Pandang merupakan pelabuhan yang terbesar di Sulawesi Selatan, yang mempunyai peranan penting dalam lalu lintas pelayaran baik dalam negeri maupun luar negeri, karena letaknya yang strategis dapat menghubungkan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.

Pada mulanya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar dulu dikenal dengan nama Haven Directie yaitu nama pelabuhan di Indonesia Timur yang dipakai sebelum zaman kemerdekaan yang pada waktu itu kebanyakan dikelola oleh orang asing dari pada orang pribumi.

Seteleh zaman kemerdekaan badan hukumnya berubah menjadi "Jawatan Pelabuhan", tetapi tidak lama kemudian diganti menjadi "Badan Pengusaha Pelabuhan atau *Port Administration*. Dari badan Pengusaha Pelabuhan inilah yang menjadi Perum Pelabuhan IV Cabang Makassar yang resmi didirikan berdasarkan SK. PP. No, 17 tahun 1983 tanggal 30 April 1983 yang disempurnakan dengan PP. No. 7 tahun 1985 dan sekarang menjadi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Kelas I Makassar yang keluar berdasarkan SK No. 59 tanggal 19 Oktober 1991 dan resmi digunakan mulai tanggal 1 Desember 1992.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Job Discription

Struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia IX berdasarkan struktur organisasi divisi. Setiap divisi yang ada dalam struktur organisasi dipimpin oleh seorang kepala divisi. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan mampu menjaga kekayaan perusahaan dari kesalahan yang dilakukan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Struktur organisasi ibarat mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain, dimana jika salah satu dari mata rantai tersebut putus, maka dapat dipastikan

perusahaan akan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Dalam organisasi perusahaan, harus ada kerja sama yang baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, dan masing-masing bagian harus mengetahui dan memahami tugas, dan tanggung jawab masing-masing, agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikontrol dengan baik.

Dalam struktur organisasi harus jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi waktu, tenaga, untuk mencapai hasil yang maksimal agar perusahaan bisa tetap eksis pada persaingan antar perusahaan. Untuk menjaga agar kekayaan perusahaan dapat terdeteksi dengan baik, maka struktur organisasi harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah diputuskan bersama oleh manajemen perusahaan. Dan perlunya fungsi kontrol agar sistem yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan dapat berjalan dan dipatuhi sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu sistem yang diterapkan oleh perusahaan harus ada struktur organisasi yang mengatur arah kebijakan manajemen perusahaan yang harus dipatuhi oleh setiap divisi yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah dan mempunyai visi yang sama untuk menjalankan perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya yang menjadi pesaing. Oleh sebab itu struktur organisasi dibentuk agar penempatan orang-orang yang professional untuk

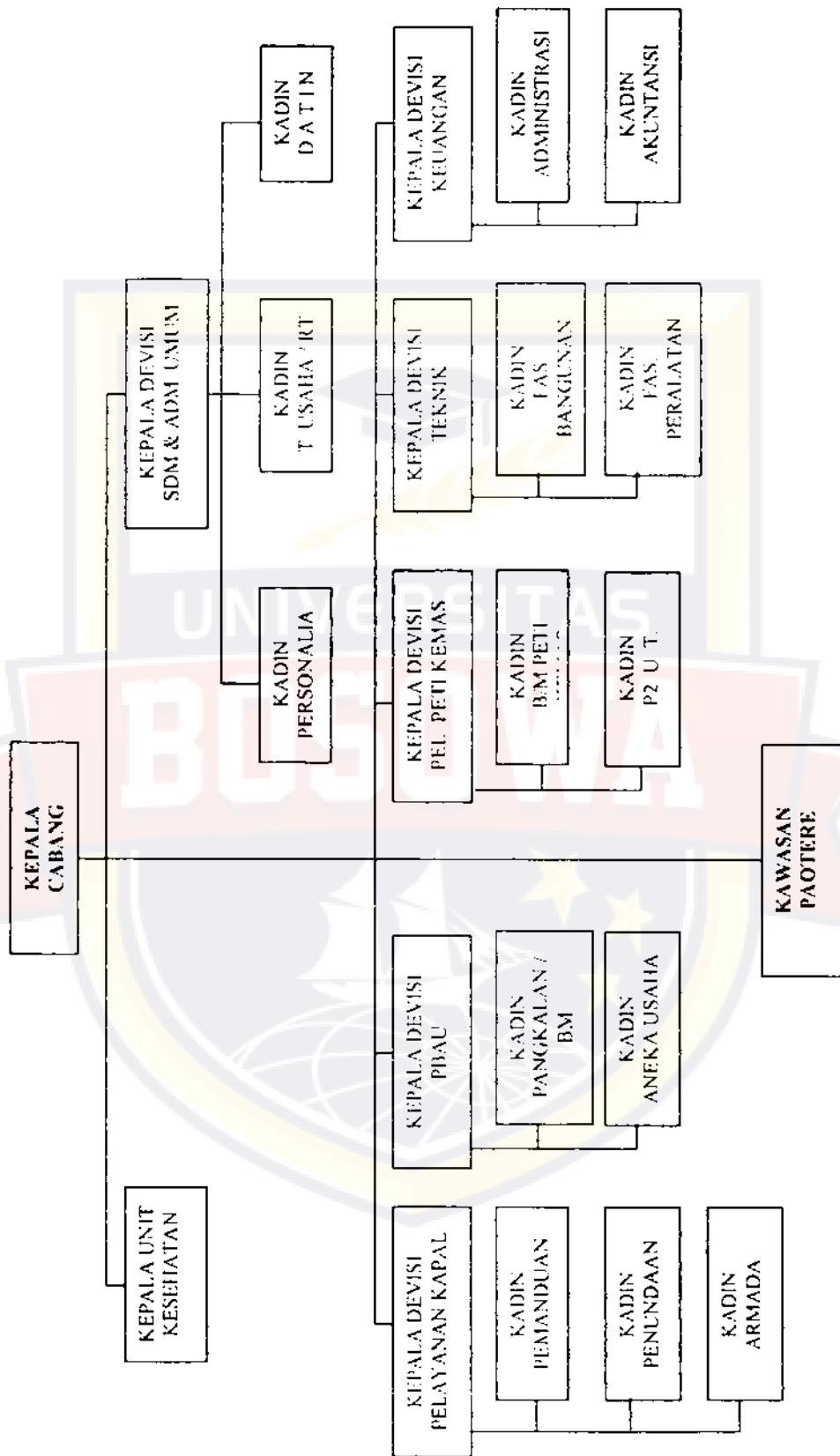
menduduki jabatan yang ada, dimana setiap fungsi harus mempunyai visi yang sama dalam memajukan perusahaan.

Salah satu bagian yang ada dalam struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia IV adalah bagian akuntansi yang merupakan pusat informasi keuangan. Informasi keuangan ada pada bagian akuntansi yang mengolah bukti-bukti transaksi menjadi suatu laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti : pemegang saham, manajemen perusahaan, kantor pajak, bank, dan lain-lain.

Berikut struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan :



GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI PT (PERSERO)
PELABUHAN INDONESIA IV CABANG MAKASSAR



Sumber: PT. (Persero) Pelabuhan IV Cabang Makassar